



Bentangan

Hukum Yan Prana Jaya Indra Rasyid 10 Tahun dan Pidana Denda Rp 500 Juta

Pendahuluan

Yan Prana Jaya Indra Rasyid Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Siak mulai penghujung 2011 sampai jelang akhir 2017. Dia sempat jadi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak dan setelahnya diangkat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Riau.

Baru 2 tahun jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi, Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau mencium bau korupsi dari badan Yan ketika menduduki kursi jabatan tertinggi di Bappeda Siak. Kasus itu terendus ketika penyidik memeriksa dua bendahara pada masanya.

Yan, korupsi perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor dan konsumsi pegawai. Modusnya, bawahan Yan: bendahara dan kasubbag umum memangkas perjalanan dinas 10 persen dan menggelembung harga pembelian peralatan serta makan-minum harian pegawai.

Kwitansi dipalsukan dan tidak sesuai dengan realisasi uang yang dikeluarkan dari kas bendahara. Laporan yang manipulatif tersebut tidak pernah sampai ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), sehingga wajar saja Yan sering dapat penghargaan selama jadi Kepala Bappeda Siak.

Yan mulai diperiksa pada 16 Desember 2020, setelah 12 hari dari pemanggilan pertama yang tak dihadapinya. Satu minggu kemudian, penyidik Kejati Riau kembali memanggil Yan dan langsung ditetapkan tersangka setelah diperiksa lebih kurang tujuh jam lamanya. Mulai siang itu, Yan ditahan di Rutan Sialang Bungkok.

Yan mulai jalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mulai 18 Maret 2021. Sampai sidang ke 17, majelis telah memeriksa 43 saksi fakta dan 2 ahli yang dihadirkan penuntut umum. Sedangkan penasihat hukum Yan juga menghadirkan satu saksi meringankan ditambah tiga ahli. Hanya satu kali sidang ditunda karena majelis tidak lengkap dan waktu juga sudah kesorean. Masa penahanan Yan akan berakhir pada Agustus, sehingga majelis berusaha dapat selesaikan persidangan ini pada Juli.

Berikut ringkasan hasil pantauan sidang tim Senarai mulai dari pembacaan dakwaan:

Terdakwa

Nama	: Yan Prana Jaya Indra Rasyid
Umur	: 56 tahun
Tempat dan tanggal lahir	: Pekanbaru, 18 Oktober 1965
Pekerjaan	: Kepala Bappeda Siak September 2011-September 2017 dan Sekda Riau Non aktif.
Agama	: Islam

Majelis Hakim

Lilin Herlina—ketua
Iwan Irawan—anggota
Darlina Darwis— anggota



Penuntut Umum

Hendri Junaidi
Reflen
M Zulkifli Said
Dicky Wira Buana
Wirawan Prabowo

Penasihat Hukum

Deni Azani B Latief
Ilhamdi Taufik
Alhendri Tanjung

Dakwaan

Yan Prana Jaya dikenai dengan dakwaan:

Pertama Primair

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU 20/2001 Jo UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Subsidiar Kesatu

Pasal 3 Jo Pasal 18 UU 20/2001 Jo UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pasal 3 ayat (1): Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Subsidiar Kedua

Pasal 12 huruf (E) UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pasal 12 huruf (E): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Dipidana dengan pidana penjara



seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

Subsida Ketiga

Pasal 12 huruf (F) UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pasal 12 huruf (F): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

Kesaksian

Tabel Kesaksian

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	Anton Fitriadi	Pegawai Bappeda Siak	Pemotongan 10 persen perjalanan dinas sudah dibahas dan disepakati pada rapat awal tahun 2014. dia keberatan dengan pemotongan itu. Setelah Yan tidak menjabat, tidak ada pemotongan lagi. Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-yan-prana-potong-sepuluh-persen-biaya-perjalanan-dinas/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=8rwLJUuLcbw
2	Azmarman Yohanto	Pegawai Bappeda Siak	Sejak awal dia hanya diam mendengar informasi pemotongan biaya perjalanan dinas dan sebenarnya tidak setuju. Karena hal itu disampaikan langsung oleh Yan dalam rapat, dia menerima saja. Kata Bendahara Dona Fitria dan Ade Kusendang uang akan dipakai untuk operasional kantor, biaya pendirian stand dan pelaksanaan MTQ. Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-yan-prana-potong-sepuluh-persen-biaya-perjalanan-dinas/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=8rwLJUuLcbw
3	Donni Aslyndo	Pegawai Bappeda Siak	Dia tidak ikut rapat awal 2014 saat pemotongan perjalanan dinas itu dibahas. Tahunya, ketika menerima uang pengganti setelah melakukan perjalanan dengan uang pribadi. Uangnya sudah

			<p>dipotong dan menolaknya. Masa-masa itu BPK, BPKP maupun inspektorat memang belum memberikan catatan buruk terhadap tata kelola keuangan di Bappeda Siak.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-yan-prana-potong-sepuluh-persen-biaya-perjalanan-dinas/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=8rwLJUuLcbw</p>
4	Muhamad Rafi	Pegawai Bappeda Siak	<p>Sejak 2014, sudah dapat pemotongan biaya perjalanan. Uangnya yang terpakai selama perjalanan tidak dikembalikan utuh oleh Bendahara Dona Fitria, karena ada kesepakatan pemotongan 10 persen. Dia juga tidak menanyakan alasan pemotongan itu ke bendahara. Tidak merasa rugi dengan pemotongan tersebut karena juga dapat uang saku.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-yan-prana-potong-sepuluh-persen-biaya-perjalanan-dinas/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=8rwLJUuLcbw</p>
5	Nursyamsiah	Pegawai Bappeda Siak	<p>Pemotongan itu sudah dibahas awal tahun 2014 pada rapat evaluasi dan rencana kegiatan tahun tersebut. Seingatnya, peserta rapat hanya diam mendengar tawaran tersebut. Tidak ada nota atau berita acara kesepakatan terkait hal itu.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-yan-prana-potong-sepuluh-persen-biaya-perjalanan-dinas/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=8rwLJUuLcbw</p>
6	Iskandar	Pegawai Bappeda Siak	<p>Selama pemotongan perjalanan dinas berlangsung, bendahara yang melakukannya Dona Fitria dan Ade Kusendang. Sebenarnya keberatan dengan keputusan tersebut namun tidak pernah mengungkapkan dan tidak berani protes.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-masih-ungkap-potongan-10-persen-sppd/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=HKQ3jLTpwEY</p>
7	Fitra Jaya Purnama	Pegawai Bappeda Siak	<p>Dia juga keberatan dengan kebijakan pemotongan tersebut. Karena mendengar itu keputusan atasan dan mayoritas pegawai tidak ada yang menyatakan keberatan, ia sudah dianggap keputusan bersama. ada kegiatan yang tidak punya anggaran dalam APBD. Seperti tunjangan hari raya bagi honorer termasuk kegiatan umum semacam peringatan hari-</p>

			<p>hari kegunaan atau acara sejenisnya. Juga para auditor negara atau pemerintah juga tidak pernah periksa penyelewengan anggaran saat verifikasi keuangan di Bappeda Siak. Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-masih-ungkap-potongan-10-persen-sppd/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=HKQ3jLTpwEY</p>
8	Rio Arta	Pegawai Bappeda Siak	<p>Dia juga sempat jadi bendahara pengeluaran pada 2012. Katanya, sejak itu Yan Prana sudah memerintahkan memotong SPPD sebesar 10 persen. Selama itu pula, dia kerap menyerahkan uang hasil pemotongan itu pada Yan. Terkadang, atasannya itu memanggil langsung dan memintanya menyiapkan sejumlah uang. Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-masih-ungkap-potongan-10-persen-sppd/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=HKQ3jLTpwEY</p>
9	Raja Juarisman	Pegawai Bappeda Siak	<p>Setiap kali menerima penggantian biaya perjalanan, uangnya selalu dipotong 10 persen. Dia mengatakan, pemotongan itu untuk menutupi biaya kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD. Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-masih-ungkap-potongan-10-persen-sppd/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=HKQ3jLTpwEY</p>
10	Ade Hendri Alamsyah	Pegawai Bappeda Siak	<p>Saat jadi Kasubbag Keuangan ia tidak pernah periksa laporan resmi. Dalam laporan itu tidak ada termuat pemotongan 10 persen. BPK, BPKP dan Inspektorat juga tidak pernah menanyakan itu. Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-masih-ungkap-potongan-10-persen-sppd/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=HKQ3jLTpwEY</p>
11	Budiana	Pegawai Bappeda Siak	<p>Namun berdasarkan pengalamannya, keputusan pemotongan hanya berlaku masa Yan jadi Kepala Bappeda saja. Paska itu, model itu tak diberlakukan lagi. Link: https://senarai.or.id/korupsi/saksi-pemotongan-biaya-perjalanan-dinas-kebijakan-yan/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ce052qzzQjc</p>

12	Andi Darmawan	Pegawai Bappeda Siak	<p>Dia keberatan pemotongan 10 persen biaya perjalanan dinas yang berlaku pada 2014-2017. Hanya saja tak pernah mengutarakannya karena takut.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/korupsi/saksi-pemotongan-biaya-perjalanan-dinas-kebijakan-yan/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ce052qzzQjc</p>
13	Tengku Ferdiansyah Fadil	Pegawai Bappeda Siak	<p>Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dia tak tahu kegunaan uang 10 persen tersebut setelah dipotong oleh bendahara. Dia takut pada Yan kalau hendak protes.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/korupsi/saksi-pemotongan-biaya-perjalanan-dinas-kebijakan-yan/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ce052qzzQjc</p>
14	Linda	Pegawai Bappeda Siak	<p>Ia terima saja kebijakan pemotongan biaya perjalanan dinas sebesar 10 persen karena sudah perintah atasannya, Yan. Dia tak ikut rapat ketika kebijakan itu dibahas, sebab sebelum 2015 masih tenaga honorer.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/korupsi/saksi-pemotongan-biaya-perjalanan-dinas-kebijakan-yan/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ce052qzzQjc</p>
15	Muhammad Agung Afandi	Pegawai Bappeda Siak	<p>Hasilnya pengembalian biaya perjalanan berkurang karena dipotong sebanyak 10 persen oleh Bendahara Ade Kusendang. Informasi pemotongan diketahuinya dari Ade Kusendang, tidak tahu perintah siapa.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/korupsi/saksi-bendahara-sebut-pemotongan-perintah-pimpinan/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=vLAZdCqfxdo</p>
16	Muhammad Faisal Harahap	Pegawai Bappeda Siak	<p>Tidak tahu harga konsumsi dan alat tulis kantor, semua urusan pembelian diambil alih bagian keuangan dan umum. Ia hanya terima hasil dan tanda tangan laporan kegiatan.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/korupsi/saksi-bendahara-sebut-pemotongan-perintah-pimpinan/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=vLAZdCqfxdo</p>
17	Herianto	Pegawai Bappeda Siak	<p>Selama jabat PPTK kegiatan 2015-2017, serupa dengan Faisal yang hanya sampaikan kebutuhan kegiatan. Urusan pembelian, tagihan dan</p>

			<p>pembayaran diambil alih bagian keuangan. Link: https://senarai.or.id/korupsi/saksi-bendahara-sebut-pemotongan-perintah-pimpinan/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=vLAZdCqfxdo</p>
18	Awaludin	Pegawai Bappeda Siak	<p>Awaludin katakan biaya perjalanan dinasnya dipotong. Ia pilih diam, takut pertanyakan kegunaan potongan itu dan ikut perintah Yan Prana saja.</p> <p>Ada juga kelebihan bayar untuk beli nasi kotak, biaya seharusnya Rp 30.000 naik jadi Rp 40.000. Kelebihan bayar ini merupakan inisiatifnya bersama bendahara. Awalnya uang disimpan bendahara lalu hasilnya dibagi dua. Link: https://senarai.or.id/korupsi/saksi-bendahara-sebut-pemotongan-perintah-pimpinan/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=vLAZdCqfxdo</p>
19	Sapta Saily	Pegawai Bappeda Siak	<p>Kebijakan tersebut sudah dibahas dan disepakati dalam rapat tahunan di 2014 yang diputuskan langsung oleh Yan. Tapi, dia tidak dengar jelas pembahasan terkait itu. Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-keberatan-perjalanan-dinas-dipangkas/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=a_P79jM4Wks</p>
20	Rozi Chandra	Pegawai Bappeda Siak	<p>Dia keberatan tiap kali uang perjalanan dinasnya dipangkas 10 persen. Tapi unek-uneknya itu tak pernah disampaikan. Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-keberatan-perjalanan-dinas-dipangkas/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=a_P79jM4Wks</p>
21	Hendrizal	Pegawai Bappeda Siak	<p>Dia keberatan dengan kebijakan tersebut tapi manut saja dan tidak pernah sampaikan keluhannya, meski biaya perjalanan dinas memakai uang pribadinya terlebih dahulu. Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-keberatan-perjalanan-dinas-dipangkas/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=a_P79jM4Wks</p>
22	Selsuanda Musasma	Pegawai Bappeda Siak	<p>Meski telah disampaikan bendahara, bahwa pemangkasan biaya perjalanan dinas atas perintah Yan, dia tetap merasa keberatan. Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-keberatan-perjalanan-dinas-dipangkas/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=a_P79jM4Wks</p>

23	Marfin Yogasara	Pegawai Bappeda Siak	Marfin mengaku jumlah yang diterimanya berbeda dengan jumlah yang tercantum pada kuitansi, nominalnya berkurang 10%. Bendahara bilang uang tersebut memang sudah dipotong 10% dan itu sudah perintah atasan. Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-keberatan-atas-pemotongan/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=UKkloJhAui4
24	Widiasari	Pegawai Bappeda Siak	Saat itu tidak ada peserta rapat yang menyatakan keberatan dan mengatakan setuju Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-keberatan-atas-pemotongan/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=UKkloJhAui4
25	Yusrianto	Pegawai Bappeda Siak	Saya keberatan dengan pemotongan, tapi tidak berani menyampaikannya Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-keberatan-atas-pemotongan/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=UKkloJhAui4
26	Siti Aminah	Pegawai Bappeda Siak	Saya sebenarnya keberatan, tapi tidak berani menyampaikannya Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-keberatan-atas-pemotongan/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=UKkloJhAui4
27	Rahmat Hidayat	Pegawai Bappeda Siak	Saya tidak keberatan atas pemotongan itu. Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-keberatan-atas-pemotongan/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=UKkloJhAui4
28	Zefron	Pegawai Bappeda Siak	Hanya dua kali melakukan perjalanan dinas, tapi direkap tercatat lebih pada rekapan SPPD Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-keberatan-atas-pemotongan/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=UKkloJhAui4
29	Wan Muhammad Yunus	Pegawai Bappeda Siak	Selama menjabat sebagai sekretaris, Wan mengaku tidak pernah dilibatkan pembicaraan terkait pemotongan 10% dengannya. Saat rapat 2014 ia tidak ada sampaikan keberatan terkait usulan itu. Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-keberatan-atas-pemotongan/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=UKkloJhAui4
30	Devy Susanto	Pegawai	Lebih sering terima barang berikut dengan berita

		Bappeda Siak	acara sekaligus. Selain itu, barang yang diterima kerap tidak sesuai dengan berita acara penyerahan. Link: https://senarai.or.id/korupsi/yan-perintah-cari-duit-dari-pengadaan-atk/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=WKFCRZS3JVQ
31	Nurmaneli	Pegawai Bappeda Siak	Dia sering mengisi faktur atau bon kosong sesuai berita acara yang diterimanya dari Erita, Dona Fitria dan Ade Kusendang. Dia tak tahu, benar atau tidak angka-angka yang disalinnya. Link: https://senarai.or.id/korupsi/yan-perintah-cari-duit-dari-pengadaan-atk/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=WKFCRZS3JVQ
32	Rieke Edriani	Pegawai Bappeda Siak	Dia tak tahu, apakah sumber laporan pembelian ATK yang disusunnya tersebut dibuat dengan benar atau tidak. Link: https://senarai.or.id/korupsi/yan-perintah-cari-duit-dari-pengadaan-atk/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=WKFCRZS3JVQ
33	Erita	Pegawai Bappeda Siak	Dia meminta faktur kosong ke toko dan mengisinya sesuai dokumen penganggaran untuk buat laporan ke bendahara. Uang yang dicairkan oleh bendahara lebih besar dari harga barang yang dibayar. Sisanya itulah yang diserahkan ke Yan. Link: https://senarai.or.id/korupsi/yan-perintah-cari-duit-dari-pengadaan-atk/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=WKFCRZS3JVQ
34	Ramli	Pemilik Toko UD Zidan dan Baim	Saat diminta tandatangan, dia membaca berita acara dan kwitansi yang disodorkan padanya tidak sesuai dengan barang-barang yang telah dipasok sebelumnya. Dia menyadari kecurangan tersebut. Namun dia tetap menekan bukti pembayaran asal barang-barangnya dilunasi. Link: https://senarai.or.id/korupsi/yan-perintah-cari-duit-dari-pengadaan-atk/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=WKFCRZS3JVQ
35	Hendri Budiman	Pemilik Toko Ranggon	Sebelum Bappeda Siak pindah ke usaha dagang milik Ramli, tokonya pernah memasok peralatan kantor ke instansi tersebut. Itu sekitar Januari 2015 dan pembayaran pada Maret. Link: https://senarai.or.id/korupsi/yan-perintah-cari-duit-dari-pengadaan-atk/ Video:

			https://www.youtube.com/watch?v=WKFCRZS3JVQ
36	Dona Fitria	Bendahara Bappeda Siak	<p>Uang hasil pemotongan dikumpul dan dipegang sendirinya olehnya. Dia buat catatan kecil dibuku pribadi tiap-tiap duit yang dipotong. Tiap bulan, Yan mintanya serahkan Rp 5 juta sampai Rp 10 juta. Dia antar langsung atau terkadang Yan datang ke ruangannya.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-bukti-bukti-pemangkasan-perjalanan-dinas-dirobek-dan-dibakar/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=doPzzXUjKuQ; https://www.youtube.com/watch?v=yoEQRoYLEvg</p>
37	Ade Kusendang	Bendahara Bappeda Siak	<p>Bila butuh uang, Yan tinggal memanggilnya. Seperti Dona, dia juga kerap titip uang ke Eka Susanti bila berhalang hadir di kantor. Dia juga bikin catatan jumlah uang dari hasil pemangkasan perjalanan dinas pegawai. Termasuk jumlah uang yang telah diserahkan pada Yan. Sepanjang 2015-2017, dia telah serahkan Rp 795 juta pada Yan, hasil pemangkasan perjalanan dinas yang terkumpul. Terakhir kali, dia bersama Erita, serahkan uang pemangkasan perjalanan dinas dan ATK Rp 30 juta ke Yan, depan kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-bukti-bukti-pemangkasan-perjalanan-dinas-dirobek-dan-dibakar/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=doPzzXUjKuQ; https://www.youtube.com/watch?v=yoEQRoYLEvg</p>
38	Eka Susanti	Pegawai Bappeda Siak	<p>Katanya, tak ada penyelewengan dalam makan-minum. Belanja makan per orang pegawai Rp 17 ribu tetap dibayar segitu. Pemesanan pun disesuaikan dengan jumlah pegawai yang hadir kerja tiap hari itu juga. Tapi, bukti pembeliannya berupa bon kosong yang diisi sendiri. Saat ini, rumah makan kakak kandungnya tak berjualan lagi.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-bukti-bukti-pemangkasan-perjalanan-dinas-dirobek-dan-dibakar/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=doPzzXUjKuQ; https://www.youtube.com/watch?v=yoEQRoYLEvg</p>
39	Suhartini	Pegawai Bappeda Siak	<p>Kerjaan lainnya, menyusun rekapitulasi laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas pegawai Bappeda Siak. Dia juga mengisi tiap bon-bon kosong yang diserahkan bendahara, terutama terkait belanja ATK dan konsumsi harian pegawai.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-bukti-bukti-pemangkasan-perjalanan-dinas-dirobek-dan-dibakar/ Video:</p>

			https://www.youtube.com/watch?v=doPzzXUjKuQ ; https://www.youtube.com/watch?v=yoEQRoYLEvg
40	Damas Khan	Pegawai Bappeda Siak	<p>Dia tak tahu menahu benar atau tidaknya realisasi barang. Dia juga pernah disuruh isi bon kosong dari sebuah toko roti.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-bukti-bukti-pemangkasan-perjalanan-dinas-dirobek-dan-dibakar/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=doPzzXUjKuQ; https://www.youtube.com/watch?v=yoEQRoYLEvg</p>
41	Budiman	Pegawai Bappeda Siak	<p>Dia tak ikhlas dengan kebijakan pemotongan 10 persen, tapi tak pernah utarakan unek-uneknya, kecuali hanya dihadapan bendahara langsung.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-bukti-bukti-pemangkasan-perjalanan-dinas-dirobek-dan-dibakar/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=doPzzXUjKuQ; https://www.youtube.com/watch?v=yoEQRoYLEvg</p>
42	Said Khairuddin	Pegawai Bappeda Siak	<p>Dia sering melihat besaran biaya yang tertera dalam kwitansi untuk ditandatanganinya lebih besar dari yang diterima. Dia tak acuhkan hal itu asal utang barangnya telah dilunasi.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-bukti-bukti-pemangkasan-perjalanan-dinas-dirobek-dan-dibakar/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=doPzzXUjKuQ; https://www.youtube.com/watch?v=yoEQRoYLEvg</p>
43	Candra	Pemilik Toko Roti MJ	<p>Ia juga melihat penggelumbangan pembayaran dari kwitansi dibanding yang diterima sebenarnya.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-bukti-bukti-pemangkasan-perjalanan-dinas-dirobek-dan-dibakar/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=doPzzXUjKuQ; https://www.youtube.com/watch?v=yoEQRoYLEvg</p>
44	Sri Mulyani	Auditor Inspektorat Pekanbaru	<p>Untuk perjalanan dinas terdapat pemangkasan biaya 10 persen yang diambil oleh bendahara dari para pegawai yang bersangkutan. erdapat selisih pembayaran atau uang yang dikeluarkan oleh bendahara lebih besar dari realisasi pembayaran ATK ke toko tujuan pembelian. juga terdapat selisih pembayaran ke rumah makan dan gerai roti tempat pemesanan.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/ahli-ada-kerugian-negara-dari-perjalanan-dinas-belanja-atk-maupun-makan-dan-minum/</p> <p>Video : https://www.youtube.com/watch?v=4CBKNOQWJWg</p>

45	Siswo Sujanto	Ahli keuangan negara	<p>Pemangkasan perjalanan dinas masuk kategori keuangan negara, karena negara akan mengeluarkan kembali biaya untuk menutupi kekurangan perjalanan dinas yang tidak utuh diganti pada para pegawai.</p> <p>elebihan pembayaran ATK maupun makan dan minum yang tidak sesuai alokasi, telah melanggar prinsip penggunaan keuangan yang harus menghindari kerugian negara.</p> <p>pembayaran THR tenaga honorer dan kegiatan lain yang tidak dianggarkan cara-cara itu termasuk illegal dalam pengelolaan keuangan negara.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/ahli-ada-kerugian-negara-dari-perjalanan-dinas-belanja-atk-maupun-makan-dan-minum/</p> <p>Video : https://www.youtube.com/watch?v=4CBKNQQWJWg</p>
46	Azhruddin M Amin	Saksi A de charge	<p>Selama Yan menjadi Kepala Bappeda, selalu terbaik di Riau dan pernah jadi 4 terbaik nasional. Juga jadi referensi untuk peningkatan ekonomi, pariwisata dan pertanian.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/ahli-dakwa-an-yang-memuat-kerugian-negara-selain-dari-bpk-haruslah-batal/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=wafF7m1EMKw</p>
47	Mexasai Indra	Ahli Hukum Administrasi Negara	<p>Mexasai sebut bahwa kewenangan inspektorat dalam melakukan kerja dibatasi batas wilayah administrasi tempat pendirian. Jika Inspektorat bekerja melewati batas wilayah maka terjadi kelainan maksud dari sebuah kewenangan dan hasil kerjanya dianggap tidak ada.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/ahli-dakwa-an-yang-memuat-kerugian-negara-selain-dari-bpk-haruslah-batal/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=wafF7m1EMKw</p>
48	Erdiansyah	Ahli Hukum Pidana	<p>Nilai kerugian negara dengan melibatkan pihak selain BPK, maka hasil itu tidak sah dan dianggap salah. Maka dakwaan yang memuat kerugian negara selain dari BPK haruslah batal.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/ahli-dakwa-an-yang-memuat-kerugian-negara-selain-dari-bpk-haruslah-batal/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=wafF7m1EMKw</p>
49	Elwi Danil	Ahli Hukum Pidana	<p>Untuk perkara Tipikor khususnya terdapat kerugian negara, Elwi berpendapat untuk menetapkan</p>

			tersangka tidak boleh hanya sekedar pakai 2 alat bukti. Harus dahulu ditemukan nilai kerugian negara yang sudah ditetapkan oleh BPK. Link : https://senarai.or.id/korupsi/ahli-jika-melakukan-pelanggaran-hukum-adminstrasi-diutamakan/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=Cy_8OSZt5oQ
50	Yan Prana Jaya Indra Rasyid	Terdakwa	Yan mengaku beberapa kali dapat uang dari Bendahara Dona Fitriana dan Ade Kusendang. Lalu seringkali meminta bantuan kepada kedua Bendahara dan Erita agar carikan uang, untuk diberi kepada tamu yang mendatangnya ataupun sekedar meminta tolong. Yan tahu pemotongan itu terlaksana setelah dapat laporan dari staffnya yang mengeluh. Ia mengaku sibuk dan pegang banyak jabatan sehingga tidak sempat untuk lakukan monitoring. Link: https://senarai.or.id/korupsi/yan-terima-uang-dari-bendahara/

Sidang tunda

No	Tanggal	Alasan Penundaan
1	29 Juni 2021	Hakim tidak lengkap dan waktu sudah kesorean. Link : https://senarai.or.id/korupsi/yan-prana-batal-diperiksa/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=Z5oBvGVmxJo

Anton Fitriadi

Dia kerja di Bappeda Siak mulai 2012, sebagai staf. Pada 2015 sampai 2017, dia menduduki posisi Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sejak 2014, dia beberapa kali melakukan perjalanan dinas, baik karena memenuhi undangan atau agenda sendiri. Di Pemerintahan Siak, anggaran perjalanan dinas sudah ditetapkan biayanya berdasarkan jarak tempuh dan kebutuhan di tempat. Dengan kata lain, sudah ditetapkan standar tiap-tiap wilayah.

Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu menggunakan uang pribadi. Setelah kembali, mereka membuat laporan berikut bukti-bukti biaya yang dikeluarkan untuk memudahkan bendahara atau bagian keuangan mengganti uang tersebut. Namun sejak 2014, uang pengganti tiap perjalanan dinas itu dipotong 10 persen. Artinya, Dia tidak menerima utuh penggantian biaya perjalanan dinas yang sudah mengocek uang pribadinya. Atau, jumlah uang yang tertera dikwitansi lebih besar dari yang diterima. Pemotongan itu langsung dilakukan oleh Dona Fitriana, bendahara waktu itu.



Katanya, pemotongan 10 persen perjalanan dinas sudah dibahas dan disepakati pada rapat awal tahun 2014. Itu langsung disampaikan Yan pada seluruh pegawai Bappeda Siak yang hadir dalam rapat. Keputusan itu tidak tertulis atau tertuang dalam berita acara yang ditandatangani seluruh peserta rapat. Tidak ada juga aturan pemerintah setempat tentang pemotongan tersebut. Dia tidak tahu ke mana uang hasil pemotongan itu diserahkan dan digunakan. Sebenarnya, dia keberatan dengan pemotongan itu. Setelah Yan tidak menjabat, tidak ada pemotongan lagi.

Azmarman Yohanto

Dia tugas di Bappeda Siak sejak 2006. Mulai 2011-2017, menjabat Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan. Juga pernah melakukan sejumlah perjalanan dinas dan menggunakan uang pribadi terlebih dahulu. Uangnya tidak diganti sepenuhnya karena dipotong 10 persen oleh Bendahara Dona Fitria dan Ade Kusendang, waktu itu. Katanya, pemotongan tersebut buat biaya operasional kantor. Selain itu juga pernah digunakan untuk pembuatan *stand* saat Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) di Siak.

Dia membenarkan rekapan perjalanan dinas yang pernah dilakukannya dari data disodorkan penuntut umum. Seingatnya, pemotongan biaya perjalanan dinas dibahas pada rapat awal tahun 2014. Tapi dia tidak tahu siapa yang usulkan. Dia mendapat kabar itu dari stafnya, Ade Hendri dan Faisal. Semua yang hadir rapat sepakat dengan pemotongan itu.

Katanya, dari awal dia hanya diam mendengar informasi dan sebenarnya tidak setuju. Karena hal itu disampaikan langsung oleh Yan dalam rapat, dia menerima saja. Sebelum dan Setelah Yan tidak di Bappeda, tidak pernah ada pemotongan lagi.

Donni Aslyndo

Mulai 2012 akhir sampai 2015 tugas di Bappeda Siak sebagai Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Juga mengakui pemotongan perjalanan dinas 10 persen oleh Bendahara Dona Fitria. Buktinya, dia menerima uang lebih kecil dari jumlah di kwitansi yang ditandatanganinya. Dia tidak ikut rapat awal 2014 saat pemotongan perjalanan dinas itu dibahas. Tahunya, ketika menerima uang pengganti setelah melakukan perjalanan dengan uang pribadi. Dia menolak pemotongan tersebut. Masa-masa itu BPK, BPKP maupun inspektorat memang belum memberikan catatan buruk terhadap tata kelola keuangan di Bappeda Siak.

Muhamad Rafi

Pada 2010, dia sempat tugas di bidang ekonomi di Bappeda Siak. Setahun kemudian sampai 2017 pindah ke bidang penelitian dan pengembangan. Sejak 2012 memang sudah sering melakukan perjalanan dinas, baik dalam kota maupun luar provinsi. Seperti saksi lainnya, dia juga menggunakan uang pribadi diawal dan baru diganti setelah pulang oleh bagian keuangan.

Sejak 2014, sudah dapat pemotongan biaya perjalanan. Uangnya yang terpakai selama perjalanan tidak dikembalikan utuh oleh Bendahara Dona Fitria, karena ada kesepakatan pemotongan 10 persen. Begitu juga pada 2015. Bedanya, pada tahun itu dia sempat menerima penuh uang pengganti perjalanan dinas tapi beberapa hari kemudian, Bendahara Ade Kusendang meminta kembali sebagian uang tersebut.

Katanya, tak ikut rapat saat pemotongan perjalanan dinas itu dibahas. Dia juga tidak menanyakan alasan pemotongan itu ke bendahara. Yang dia tahu buat kebutuhan operasional kantor. Intinya,



masa 2014-2017, dia menerima uang pengganti perjalanan dinas lebih kecil dari yang ditandatangani di kwitansi. Namun katanya, tak merasa rugi dengan pemotongan tersebut karena juga dapat uang saku atau langsam. Pemeriksaan BPK, BPKP maupun inspektorat terhadap Bappeda Siak, hasilnya baik. Katanya, Yan juga pernah dapat penghargaan Kepala Bappeda terbaik.

Nursyamsiah

Pada 2013, dia Kepala Sub Bagian Keuangan Bappeda Siak. Kemudian 2015-2019 diangkat menjadi Kepala Sub Bidang Pertanian. Juga mengalami pemotongan biaya perjalanan dinas sebesar 10 persen.

Katanya, pemotongan itu sudah dibahas awal tahun 2014 pada rapat evaluasi dan rencana kegiatan tahun tersebut. Penghujung rapat itulah disinggung pemotongan perjalanan dinas yang diusulkan oleh Yan. Seingatnya, peserta rapat hanya diam mendengar tawaran tersebut. Tidak ada nota atau berita acara kesepakatan terkait hal itu. Waktu itu juga tak disebutkan kegunaan uang pemotongan itu.

Dia semula mengatakan, setelah Yan tak menjabat lagi, tak ada pemotongan perjalanan dinas. Setelah itu dia meralat, bahwa Wan Muhammad Yunus yang mengganti Yan juga memotong biaya perjalanan dinas.

Iskandar

Tugas di Bappeda Siak pada 2008 dan masih menetap di sana sampai saat ini. Saat Yan jadi Kepala Bappeda Siak, dia staf bagian umum. Kerjanya mengurus barang-barang masuk: menerima barang dan melabelinya.

Selama jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) beberapa kali dapat perintah tugas perjalanan dinas untuk survei dan pengawasan di dalam maupun di luar daerah. Aturannya, biaya tiap perjalanan dinas ditalang pakai uang pribadi terlebih dahulu. Setelah pulang, segala laporan baik biaya yang digunakan sampai bukti-bukti kegiatan diserahkan ke bendahara untuk dapatkan uang pengganti.

Namun, dirinya tidak menerima uang pengganti dengan utuh seperti tertera di kwitansi yang ditandatanganinya. Katanya, tiap perjalanan dinas dipotong 10 persen oleh bendahara. Dia tidak pernah tanya alasannya. Dia tahu dari Bendahara, itu sudah diputuskan Yan Prana Jaya. Dia tidak ikut rapat saat kebijakan itu dibahas.

Selama pemotongan perjalanan dinas berlangsung, bendahara yang melakukannya Dona Fitria dan Ade Kusendang. Sebenarnya keberatan dengan keputusan tersebut namun tidak pernah mengungkapkan dan tidak berani protes. Namun, setelah Yan pindah tugas, tidak ada lagi kebiasaan pemotongan tersebut.

Dia, hanya pernah komplain dengan kasubag umum perihal kekurangan barang yang diterimanya. Beberapa kali tidak sesuai spesifikasi dan kualitas yang dipesan. Keberatan itu tak pernah ditanggapi. Akhirnya, dia sering menandatangani berita acara penerimaan barang meski tidak sesuai pesanan alias tidak lengkap.

Fitra Jaya Purnama

Sekarang ASN di Pemerintah Provinsi Riau. Pada 2012, dia Kasubag Program Bappeda Siak. Pada 2014 naik jabatan Kabid Statistik dan Sosial. Selama di Bappeda Siak juga sering ditugasi perjalanan dinas



dalam maupun luar daerah. Juga menalangi biayanya terlebih dahulu sebelum diganti oleh bendahara setelah pulang.

Biaya perjalanan dinas juga dipotong 10 persen, sehingga tidak pernah menerima utuh penggantian biaya dari bendahara. Dia juga tak tahu alasan pemotongan dan ke mana uang tersebut digunakan. Peralnya, tak ikut saat bahas pemotongan sebagian SPPD. Padahal, besaran atau standar biaya perjalanan dinas sudah ditetapkan dalam peraturan bupati.

Pertamanya, dia juga keberatan dengan kebijakan pemotongan tersebut. Karena mendengar itu keputusan atasan dan mayoritas pegawai tidak ada yang menyatakan keberatan, ia sudah dianggap keputusan bersama.

Katanya, ada kegiatan yang tidak punya anggaran dalam APBD. Seperti tunjangan hari raya bagi honorer termasuk kegiatan umum semacam peringatan hari-hari kegamaan atau acara sejenisnya. Meski kegiatan tersebut tetap dilaksanakan, dia tidak tahu dari mana sumber pendanaannya.

Selama di Bappeda Siak, dia tidak pernah dengar informasi atau temuan lembaga audit keuangan perihal penyelewengan anggaran. Sejak 2011 pula, lanjutnya, Bappeda Siak selalu masuk katerogri wajar tanpa pengecualian. Lagi pula, para auditor negara atau pemerintah juga tidak pernah memeriksanya saat verifikasi keuangan salah satu badan pemerintah daerah tersebut.

Rio Arta

Sejak 2007 di Bappeda Siak. Pada 2012 masih staf keuangan. Satu tahun kemudian sampai saat ini, Kasubbid Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Dia sering dapat perintah tugas perjalanan dinas untuk urusan konsultasi dan menghadiri undangan.

Seperti pegawai Bappeda lainnya, dia juga tidak pernah terima utuh penggantian biaya perjalanan dinas yang semula menggunakan uang pribadinya. Tiap kali dipotong 10 persen sejak diputuskan pada rapat rutin tahunan, 2014.

Dia juga keberatan dengan kebijakan tersebut, tapi memilih ikut perintah Yan Prana Jaya yang memimpin rapat saat itu. Seingatnya, waktu itu tidak ada yang bertanya alasan pemotongan SPPD 10 persen dan untuk apa uang itu akan digunakan. Peserta, katanya, hanya diam. Bendahara yang bertugas memotong SPPD saat Yan menjabat, Dona Fitria dan Ade Kusendang.

Dia juga sempat jadi bendahara pengeluaran pada 2012. Katanya, sejak itu Yan Prana sudah memerintahkan memotong SPPD sebesar 10 persen. Selama itu pula, dia kerap menyerahkan uang hasil pemotongan itu pada Yan. Terkadang, atasannya itu memanggil langsung dan memintanya menyiapkan sejumlah uang dari sana.

“Siapkan uang sekian,” katanya, meniru ungkapan Yan saat memanggil dirinya. Dalam laporan keuangan Bappeda Siak, memang tidak dijelaskan mengenai pemotongan tersebut. Rekapitulasi semacam itu baru dibuat setelah penyidik meminta bagian keuangan membuat catatan untuk memudahkan pemeriksaan.

Raja Juarisman

Pada 2012-2017, menjabat Kabid Infrastruktur Bappeda Siak. Dalam hal perjalanan dinas, biasanya untuk urusan pengawasan dan menghadiri undangan baik dalam maupun luar daerah. Surat perintah tugas langsung dikeluarkan oleh Kepala Bappeda Siak. Waktu itu adalah Yan Prana Jaya.



Katanya, tiap wilayah yang dikunjungi dalam perjalanan dinas, standar biaya telah ditetapkan oleh bupati. Tapi, tiap kali menerima penggantian biaya perjalanan, uangnya selalu dipotong 10 persen. Dia mengatakan, pemotongan itu untuk menutupi biaya kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD. Itu, diputuskan dalam rapat tahunan pada 2014 yang dipimpin langsung oleh Yan.

Tapi, setelah Yan tidak menjabat, pemotongan SPPD tidak diberlakukan lagi. Pengganti Yan adalah Wan Muhammad Yunus.

Ade Hendri Alamsyah

Memulai tugas di Bappeda Siak pada 2009. Pada 2014, dia menjabat Kasubbag Keuangan lebih kurang satu tahun. Setelah itu pindah ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Saat kasubbag keuangan, tugasnya buat laporan keuangan dan pengajuan gaji pegawai. Dia tahu, mengenai pemotongan SPPD 10 persen karena sering mengalaminya usai laksanakan perintah.

Kebijakan itu dibahas pada 2014. Anggaran yang terkumpul dari pemotongan SPPD digunakan buat biaya operasional Bappeda Siak atau kegiatan lain yang tidak dianggarkan dalam APBD. Namun, dia tidak verifikasi penggunaan sesungguhnya uang tersebut. Katanya, itu urusan bendahara yang bertanggungjawab langsung pada Kepala Bappeda, sekaligus pengguna anggaran.

Dia juga mengakui, tidak pernah meneliti utuh laporan keuangan. Sekedar memeriksa kelengkapan laporan. Dalam laporan keuangan resminya, memang tidak dicatat mengenai pemotongan SPPD 10 persen. Ketika Inspektorat, BPK dan BPKP datang memeriksa juga tidak pernah ditanyakan soal itu.

Budiana

Mulanya pada 2005, dia masih tenaga honorer di Bappeda Siak. Sepuluh tahun kemudian, dia diangkat jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menduduki jabatan Staf Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial hingga saat ini. Sejak berstatus ASN, beberapa kali dapat tugas perjalanan dinas, baik dalam maupun luar daerah. Biasanya, dia pakai uang pribadi terlebih dahulu dan akan diganti setelah menyerahkan laporan perjalanan.

Uang pengganti yang diterimanya lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan selama menjalankan tugas, karena dipotong 10 persen oleh Bendahara Ade Kusendang. Dia tak pernah tanya alasan pemotongan tersebut, sebab yang dia tahu kebijakan itu atas perintah Yan. Namun berdasarkan pengalamannya, keputusan itu hanya berlaku masa Yan jadi Kepala Bappeda saja. Paska itu, model itu tak diberlakukan lagi.

Andi Darmawan

Sejak 2011 hingga sekarang masih bertugas di Bappeda Siak. Awalnya sebagai staf kesekretariatan. Sekarang salah satu kepala sub bidang di sana. Perjalanan dinas selama di Bappeda Siak sudah banyak yang dilakukannya. Namun, dia keberatan pemotongan 10 persen biaya perjalanan dinas yang berlaku pada 2014-2017. Hanya saja tak pernah mengutarakannya karena takut.

Sebenarnya, standar biaya perjalanan dinas telah ditetapkan berdasarkan tiap wilayah kunjungan. Nyatanya, dia tidak pernah terima penuh sesuai yang tertera di kwitansi. Dia juga tak tahu alasan dan kegunaan biaya pemotongan tersebut. Pastinya, itu kebijakan Yan sebagai Kepala Bappeda Siak. Tapi, setelah Yan tak menjabat, Kepala Bappeda berikutnya tak meneruskan kebijakan itu lagi.

Tengku Ferdiansyah Fadil



Mulai 2012-2016 sempat bertugas di Bappeda Siak, sebelum pindah ke Dinas Pekerjaan Umum. Selama di Bappeda juga banyak perjalanan dinas yang dikerjakan. Dalam hati kerap keberatan ketika terima biaya pengganti perjalanan tidak sesuai kwitansi alias dipotong 10 persen. Dia pilih diam setelah seluruh peserta rapat tak beri komentar ketika keputusan itu dibahas dalam rapat rutin awal tahun 2014.

Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dia tak tahu kegunaan uang 10 persen tersebut setelah dipotong oleh bendahara. Dia takut pada Yan kalau hendak protes. “Ini sudah kesepakatan bersama,” katanya, mengulang penjelasan bendahara ketika menerima penggantian biaya perjalanan dinas.

Linda

Sejak 2015 hingga sekarang masih di Bappeda Siak. Banyak juga kunjungan dinas yang dilakukannya, mulai di kecamatan hingga antar provinsi. Dia terima saja kebijakan pemotongan biaya perjalanan dinas sebesar 10 persen karena sudah perintah atasannya, Yan. Dia tak ikut rapat ketika kebijakan itu dibahas, sebab sebelum 2015 masih tenaga honorer. Namun, setelah Yan tak menjabat lagi atau mulai 2018, kebijakan tersebut ditiadakan.

Sapta Saily

Dia Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappeda Siak sejak 2010 hingga sekarang. Pada 2015, saat pemotongan biaya perjalanan dinas berlangsung, dia sebagai Kasubbag Perencanaan. Selama jadi pegawai, dia berulang kali melakukan perjalanan dinas, dalam dan luar daerah. Prosedurnya, biaya perjalanan ditalang dengan uang pribadi terlebih dahulu. Ia diganti setelah kembali dan serahkan laporan berikut bukti-bukti pertanggungjawaban yang diharuskan.

Namun, uangnya yang terlanjur terpakai tak diganti sepenuhnya. Bendahara memotong 10 persen tiap-tiap biaya perjalanan dinas yang semestinya diterima oleh pegawai. Katanya, kebijakan tersebut sudah dibahas dan disepakati dalam rapat tahunan di 2014 yang diputuskan langsung oleh Yan. Tapi, dia tidak dengar jelas pembahasan terkait itu. Dia pernah sampaikan keberatannya pada bendahara.

Dia tak tahu, ke mana uang yang dipangkas 10 persen itu diserahkan oleh bendahara dan kegunaannya. Oktober 2017, Yan tidak di Bappeda lagi. Jelang akhir tahun itu pemangkasan 10 persen biaya perjalanan dinas sempat berlanjut. Tapi, memasuki 2018, kebiasaan itu dihentikan oleh kepala Bappeda pengganti Yan.

Rozi Chandra

Dia Kasubbid Kesra di Bappeda Siak sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Juga kerap melaksanakan perjalanan dinas. Dia keberatan tiap kali uang perjalanan dinasnya dipangkas 10 persen. Tapi unek-uneknya itu tak pernah disampaikan. Dia juga tak pernah cari tahu ke mana dan untuk apa uang yang dipangkas bendahara tersebut.

Hendrizar

Sejak 2011 hingga saat ini, dia sudah di Bappeda Siak. Sekarang staf penelitian dan pengembangan. Mulai 2014 sampai akhir 2017, pengganti biaya perjalanan dinasnya kerap dipotong 10 persen. Sebenarnya, dia keberatan dengan kebijakan tersebut tapi manut saja dan tidak pernah sampaikan keluhannya, meski biaya perjalanan dinas memakai uang pribadinya terlebih dahulu. Lagi pula, dia tak



berani protes karena masih pegawai baru di Bappeda Siak, kala itu. Mulai 2018, katanya, tak ada lagi pemangkasan perjalanan dinas.

Selsuanda Musasma

Tugas di Bappeda Siak mulai 2013. Sekarang di subbidang monitoring dan evaluasi. Meski telah disampaikan bendahara, bahwa pemangkasan biaya perjalanan dinas atas perintah Yan, dia tetap merasa keberatan. Hanya saja, dia tak pernah utarakan itu. Kebijakan itu berlangsung sampai akhir 2017. Tahun berikutnya tak ada pemotongan lagi.

Marfin Yogasara

Kerap melakukan perjalanan dinas, setiap perjalanan dinas itu dibiayai oleh APBD Siak. Sistemnya harus menalangi biaya dengan uang pribadi terlebih dahulu, kemudian wajib menyusun dan menyerahkan SPPD ke bagian keuangan, untuk bisa mengklaim pengembalian uang tersebut. Marfin mengaku jumlah yang diterimanya berbeda dengan jumlah yang tercantum pada kuitansi, nominalnya berkurang 10 %. Bendahara bilang uang tersebut memang sudah dipotong 10 % dan itu sudah perintah atasan.

Widiasari

Juga sering melakukan perjalanan dinas seperti pegawai lainnya. Namun pengembalian uang perjalanan dinas berbeda antara jumlah yang tercantum pada kuitansi dengan uang yang diterimanya. Ia mengetahui hal itu, karena ikut rapat rencana kerja Bappeda Siak 2014, diusulkan mengenai pemotongan uang perjalanan dinas oleh Yan Prana Jaya. “Saat itu tidak ada peserta rapat yang menyatakan keberatan dan mengatakan setuju,” katanya.

Yusrianto

Bergabung dengan Bappeda Siak tahun 2017. Sama seperti yang lain, Yusrianto mengaku menerima uang yang berbeda jumlahnya dengan tercantum di kuitansi, uang yang diterima sudah dipotong 10%. Ia mengaku tidak mengetahui pemotongan karena tidak ikut rapat pada 2014 tersebut. “Saya keberatan dengan pemotongan, tapi tidak berani menyampaikannya,” imbuhnya.

Siti Aminah

Ikut rapat rencana kerja Bappeda Siak 2014. Ia katakan ada usulan pemotongan 10% uang perjalanan dinas, guna menutupi biaya-biaya kegiatan yang tidak ada dalam anggaran. Namun tidak ada yang merespon usulan Yan itu. “Saya sebenarnya keberatan, tapi tidak berani menyampaikannya,” tambah Siti Aminah.

Rahmad Hidayat

Mengikuti rapat pada 2014, dipimpin oleh Yan Prana. Dalam rapat itu ia mendengar seperti yang disampaikan Siti Aminah. Pemotongan untuk menutupi kegiatan yang tidak dianggarkan. Namun jumlah pemotongan tidak dibahas. Usulan tersebut tidak direspons oleh peserta rapat. Setelah rapat tersebut biaya perjalanan dinas langsung dipotong 10 %. “Saya tidak keberatan atas pemotongan itu,” tutup Rahmad.



Zefron

Sempat kaget dengan rekap SPPD atas dirinya. Ia mengaku hanya dua kali melakukan perjalanan dinas, sedangkan pada rekap perjalanan lebih dari dua kali. “Hanya dua kali melakukan perjalanan dinas, tapi direkap tercatat lebih,” kata Zefron. Selama 2014 sampai 2017, total potongan uang Rahmad lebih dari Rp 53 juta.

Wan Muhammad Yunus

Ia merupakan kepala Bappeda Siak 2018 sampai sekarang. Sebelum menjabat kepala Bappeda, Wan adalah sekretaris Yan dan sempat menjadi Pelaksana tugas (Plt) pada November sampai Desember 2017.

Saat menjabat sebagai sekretaris, Wan juga kerap melakukan perjalanan dinas. Setelah pelaporan SPPD dan uang pengganti keluar namun jumlah uang yang diterimanya berkurang 10%. “Pemotongan itu terjadi sejak 2014 sebelum itu tidak ada,” tegas Wan.

Selama menjabat sebagai sekretaris, Wan mengaku tidak pernah dilibatkan pembicaraan terkait pemotongan 10% dengannya. Saat rapat 2014 ia tidak ada sampaikan keberatan terkait usulan itu. Dana pemotongan itu digunakan untuk kegiatan pameran MTQ dan yang lainnya. Wan ikut juga melakukan pemotongan perjalanan dinas November sampai Desember 2017. Jaksa menunjukkan bukti rekap SPPD dan dia mengakuinya.

Devy Susanto

Sejak 2015, dia pegawai penyimpan barang di Bappeda Siak. Tiap kali terima barang dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), disertai berita acara penyerahan. Lembaran itu terkadang telah ditandatangani oleh Yan Prana Jaya Indra Rasyid terlebih dahulu sebelum ditekennya, kemudian.

Mestinya, berita acara tersebut dibuat sendiri olehnya. Namun, lebih sering terima barang berikut dengan berita acara sekaligus. Selain itu, barang yang diterima kerap tidak sesuai dengan berita acara penyerahan. Atau, lain barang diterima lain yang tertuang dalam berita acara.

Nurmaneli

Dia staf honorer di bagian keuangan Bappeda Siak sampai saat ini. Tugasnya menginput seluruh laporan kegiatan, tiap bulan. Dia juga mengisi faktur atau bon kosong sesuai berita acara yang diterimanya dari Erita, Dona Fitria dan Ade Kusendang. Dia tak tahu, benar atau tidak angka-angka yang disalinnya.

Rieke Edriani

Dia juga honorer di bagian keuangan. Tugasnya melanjutkan pekerjaan Nurmaneli dengan buat laporan realisasi keuangan. Panduannya, berdasarkan surat pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas maupun pembelian alat tulis kantor serta makan dan minum. Seperti Nurmaneli, dia tak tahu, apakah sumber laporan yang disusunnya tersebut dibuat dengan benar atau tidak.

Erita



Dia Kasubbag Umum dan Kepegawaian di Bappeda Siak. Pada April 2015, Yan Prana Jaya memanggilmnya untuk mengurus pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK). Mulai dari pemesanan sampai pembayaran. Tokonya sudah ditetapkan bersama oleh Yan Prana Jaya dan bendahara.

Selain itu, Yan juga memintanya cari uang dari tiap pengadaan ATK tersebut. Itu dilakukannya dengan cara beli peralatan yang tidak termuat dalam dokumen penganggaran, namun seolah-olah telah membelanjakan barang-barang yang dibutuhkan tersebut.

Dia meminta faktur kosong ke toko dan mengisinya sesuai dokumen penganggaran untuk buat laporan ke bendahara. Uang yang dicairkan oleh bendahara lebih besar dari harga barang yang dibayar. Sisanya itulah yang diserahkan ke Yan.

Dia langsung antar duit tersebut ke Yan, setelah urusan di toko selesai. Hitungannya, selama 2015 sampai 2017, lebih dari Rp 400 juta telah diberikan pada Yan.

Selain soal ATK, Erita juga mengalami pemangkasan pengganti biaya perjalanan dinas sebesar 10 persen. Terkait itu, dia pernah datang ke rumah Yan bersama Bendahara Ade Kusendang. Katanya, Yan sedikit mengancam agar mereka tidak menceritakan hal tersebut. Saat itu juga, dia dengar dari Ade, bahwa bukti-bukti terkait pemangkasan perjalanan dinas telah dibakar.

Ramli

Dia pemilik toko UD Zidan dan Baim. Menyediakan ragam peralatan kantor. Bappeda Siak memesan barang ke tokonya sejak 2015. Tiap kali mengantar barang-barang yang dipesan, dia sertakan faktur yang berisi jumlah barang berikut harganya.

Namun, saat hendak pembayaran, dia dimintai lagi faktur kosong untuk diisi sendiri oleh pemesan barang dari Bappeda Siak. Saat diminta tandatangan, dia membaca berita acara dan kwitansi yang disodorkan padanya tidak sesuai dengan barang-barang yang telah dipasok sebelumnya.

Dia menyadari kecurangan tersebut. Namun dia tetap menekan bukti pembayaran asal barang-barangnya dilunasi. Dengan nada bercanda, dia pernah menyentil laporan-laporan fiktif tersebut ke Erita yang kerap memesan barang ke tokonya.

Sejak dia dipanggil penyidik, pola seperti itu tak pernah terjadi lagi meski Bappeda tetap pesan barang di tempatnya.

Hendri Budiman

Dia pemilik toko Ranggon. Sebelum Bappeda Siak pindah ke usaha dagang milik Ramli, tokonya pernah memasok peralatan kantor ke instansi tersebut. Itu sekitar Januari 2015 dan pembayaran pada Maret. Hanya satu kali itu. Pola pemesanan dan pembayarannya sama seperti toko Ramli.

Dona Fitria

Dia pegawai Bappeda Siak sejak 2003. Selama 2013-2015, ditugaskan sebagai bendahara pengeluaran. Salah satu kerjanya, mengganti biaya perjalanan dinas yang semula ditalang oleh para pegawai. Awal jadi bendahara, Yan memanggilmnya, untuk beritahu agar lanjutkan pemangkasan biaya perjalanan dinas sebesar 10 persen.



Uang hasil pemotongan dikumpul dan dipegang sendirinya olehnya. Dia buat catatan kecil dibuku pribadi tiap-tiap duit yang dipotong. Tiap bulan, Yan mintanya serahkan Rp 5 juta sampai Rp 10 juta. Dia antar langsung atau terkadang Yan datang ke ruangnya. Beberapa kali juga pernah titipkan uang ke Eka Susanti, pembantu bendahara, bila berhalangan kerja.

Katanya, sebelum Yan jadi kepala Bappeda Siak 2012, pemangkasan perjalanan dinas dengan besaran yang sama sudah berlaku. Dia sendiri juga sudah mengalaminya. Pada 2014, hal itu sempat dibahas di sela-sela rapat tahunan Bappeda Siak, sebab beberapa pegawai keberatan dengan kebijakan tersebut. Saat Yan menyinggungnya, tak ada yang komentar sehingga pemangkasan tetap diberlakukan.

Tiap tahun, dia buat rekapitulasi seluruh laporan perjalanan dinas untuk diserahkan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tapi, dia tidak mencantumkan keterangan pemangkasan 10 persen dari tiap biaya yang diganti ke para pegawai.

Awal 2015, dia diangkat jadi Kasubbag Keuangan. Dia tak lagi mengurus pemangkasan perjalanan dinas. Semua sisa uang yang sempat dipegangnya juga telah diserahkan pada Yan. Sejak itu, Yan memintanya buang buku catatan duit hasil pemotongan dan jumlah yang tiap kali diserahkan. Dia bawa pulang buku tersebut dan merobeknya di rumah.

Tiga bulan awal jadi kasubbag keuangan, dia sempat mengurus pembelian alat tulis kantor (ATK). Dari situ, dia juga pernah serahkan Rp 15 juta pada Yan dari sisa pembelian peralatan. Selanjutnya, Yan perintah Erita ambil alih pekerjaan tersebut.

Kini, Dona sudah pindah tugas sebagai ASN di Provinsi Riau. Yan, keberatan dengan beberapa keterangannya. Terutama perihal terima uang pemangkasan perjalanan dinas dan ATK. Tapi, Dona tetap dengan keterangannya. Dona juga tersangka dalam kasus ini tapi belum ditahan.

Ade Kusendang

Dia pegawai di Bappeda Siak sejak 2007. Semula, pembantu bendahara. April 2015, dia diangkat jadi bendahara pengeluaran, menggantikan Dona Fitria. Otomatis, dia juga meneruskan kebijakan pemangkasan biaya perjalanan dinas. Awalnya, dia menolak menyimpan duit hasil pemotongan perjalanan dinas. Setelah konsultasi dengan Yan, mau tidak mau dia harus jalankan peran tersebut.

Bila butuh uang, Yan tinggal memanggilnya. Seperti Dona, dia juga kerap titip uang ke Eka Susanti bila berhalang hadir di kantor. Dia juga bikin catatan jumlah uang dari hasil pemangkasan perjalanan dinas pegawai. Termasuk jumlah uang yang telah diserahkan pada Yan. Sehingga dia tahu sisa uang masuk maupun keluar. Katanya, dia pernah tunjukkan catatan tersebut pada Yan.

Sepanjang 2015-2017, dia telah serahkan Rp 795 juta pada Yan, hasil pemangkasan perjalanan dinas yang terkumpul. Terakhir kali, dia bersama Erita, serahkan uang pemangkasan perjalanan dinas dan ATK Rp 30 juta ke Yan, depan kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak.

Oktober 2017, Yan tidak kepala Bappeda lagi. Dia konsultasi ke Wan Muhammad Yunus, pengganti Yan. Pemangkasan perjalanan dinas terus diberlakukan sampai akhir tahun itu. Tapi, Wan tidak mau terima uang tersebut. Sehingga dia minta pendapat pada pegawai tiap-tiap bidang. Semua sepakat dan usulkan, sisa Rp 38 juta yang masih ditanggannya jadi modal awal pembentukan koperasi simpan pinjam pegawai Bappeda Siak.



Dia juga tersangka dalam kasus ini. Setelah diperiksa penyidik pertama kali, dia ditemani Erita datang ke rumah Yan mengadukan hal tersebut. Yan setengah mengancam agar dia tidak ikut diseret karena merasa tak ada bukti. Pulang dari rumah Yan, dia bakar buku catatan berisi uang masuk dan keluar dari hasil pemangkasan perjalanan dinas pegawai.

Eka Susanti

Dia pegawai Bappeda Siak dan sebagai pembantu bendahara, baik pada masa Dona Fitria maupun Ade Kusendang. Tugas lainnya adalah, mengurus belanja makan dan minum harian para pegawai. Dia pesan nasi ke Rumah Makan Yuni, kakak kandungnya sendiri.

Katanya, tak ada penyelewengan dalam urusan itu. Belanja makan per orang pegawai Rp 17 ribu tetap dibayar segitu. Pemesanan pun disesuaikan dengan jumlah pegawai yang hadir kerja tiap hari itu juga. Tapi, bukti pembelianya berupa bon kosong yang diisi sendiri. Saat ini, rumah makan kakak kandungnya tak berjualan lagi.

Dia tidak membantah keterangan Dona dan Ade perihal penitipan uang hasil pemangkasan perjalanan dinas untuk diserahkan pada Yan. Besarannya Rp 10 juta sampai Rp 20 juta sekali pegang. Dia antar langsung duit ke ruangan Yan, bila dipanggil.

Suhartini

Dia staf keuangan di Bappeda Siak, bantu kerja bendahara pengeluaran. Kerjaan lainnya, menyusun rekapitulasi laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas pegawai Bappeda Siak. Dia juga mengisi tiap bon-bon kosong yang diserahkan bendahara, terutama terkait belanja ATK dan konsumsi harian pegawai.

Dia awalnya berstatus honorer. Hak yang diterimanya berupa gaji bulanan dan dapat tunjangan hari raya. Mulai 2015, dia alih status jadi ASN.

Damas Khan

Dia staf keuangan di Bappeda Siak. Salah satu tugasnya, buat kwitansi pembayaran atas perintah bendahara pengeluaran. Baik untuk belanja ATK maupun konsumsi harian pegawai. Dasarnya, dokumen penerimaan barang dan berita acara. Dia tak tahu menahu benar atau tidaknya realisasi barang. Dia juga pernah disuruh isi bon kosong dari sebuah toko roti.

Budiman

Dia staf program di Bappeda Siak. Pernah melakukan perjalanan dinas selama 2014-2015. Biaya perjalanan yang ditalangnya terlebih dahulu tak pernah diganti utuh karena dipangkas 10 persen. Dia tak ikhlas dengan kebijakan tersebut, tapi tak pernah utarakan unek-uneknya, kecuali hanya dihadapan bendahara langsung.

Said Khairuddin

Pemilik toko berkat. Melayani percetakan dan penyediaan alat tulis kantor. Mengurus permintaan dari Bappeda Siak sejak 2013. Selain mencatat jumlah belanjaan pada bon toko, dia juga menyertakan satu bon kosong lagi sesuai permintaan Erita maupun Dona, yang sering berurusan dengan tokonya.



Dia sering melihat besaran biaya yang tertera dalam kwitansi untuk ditandatangani lebih besar dari yang diterima. Dia tak acuhkan hal itu asal utang barangnya telah dilunasi.

Candra

Pemilik Toko MJ. Menjual roti. Melayani pesanan dari Bappeda Siak selama 2013-2017. Juga menyerahkan bon tiap kali mengantar pesanan. Seperti Said, dia juga melihat penggelembungan pembayaran dari kwitansi dibanding yang diterima sebenarnya.

Sri Mulyani

Dia auditor dari Inspektorat Pekanbaru. Diminta penyidik melakukan audit dengan tujuan tertentu perihal temuan laporan keuangan perjalanan dinas, belanja ATK dan makan-minum. Bahan audit berupa hasil rekapitulasi tiga kegiatan tersebut, yang diperoleh dari penyidik.

Temuannya, untuk perjalanan dinas terdapat pemangkasan biaya 10 persen yang diambil oleh bendahara dari para pegawai yang bersangkutan.

Temuan dari belanja ATK: terdapat selisih pembayaran atau uang yang dikeluarkan oleh bendahara lebih besar dari realisasi pembayaran ATK ke toko tujuan pembelian.

Adapun kerugian negara yang ditemukan dari belanja makan dan minum harian pegawai: juga terdapat selisih pembayaran ke rumah makan dan gerai roti tempat pemesanan. Selain itu, tidak ada bukti terima konsumsi dari para pegawai Bappeda Siak.

Mestinya, para pegawai terima langsung uang makan dan minum ke rekening masing-masing tiap bulannya. Dia diatur dalam Permenkeu 110/2017 tentang pemberian dan tata cara pembayaran uang makan bagi pegawai negeri sipil.

Siswo Sujanto

Dia direktur pusat kajian keuangan negara dan daerah Universitas Patria Artha, Makassar. Juga mantan sekretaris direktorat jenderal perbendaharaan departemen keuangan RI. Latar belakang akademisnya, hukum keuangan negara.

Dia diminta pendapat soal modus-modus korupsi yang didakwa penuntut umum terhadap Yan. Bukan mengaudit temuan atau kegagalan dalam laporan perjalanan dinas, ATK maupun makan dan minum.

Dia dimulai dari pengertian keuangan negara dan keuangan daerah. Secara konsep tidak ada perbedaan keduanya. Hanya berbeda dalam lingkup atau wilayah pengelolaan keuangan saja. Sehingga kerugian keuangan daerah akibat korupsi juga disebut kerugian negara.

Menurutnya, kerugian negara adalah kekurangan aset negara karena perbuatan melawan hukum. Ia mengacu pada UU keuangan negara dan perbendaharaan negara.

Pemangkasan perjalanan dinas masuk kategori keuangan negara, karena negara akan mengeluarkan kembali biaya untuk menutupi kekurangan perjalanan dinas yang tidak utuh diganti pada para pegawai.

Sedangkan kelebihan pembayaran ATK maupun makan dan minum yang tidak sesuai alokasi, telah melanggar prinsip penggunaan keuangan yang harus menghindari kerugian negara. Karena dalam



modus tersebut terdapat ketidakwajaran serta tidak seimbang antara hak dan kewajiban negara. Seperti, uang keluar lebih besar dari realisasi pembayaran.

Dia juga mengkritik pembayaran THR tenaga honorer dan kegiatan lain yang tidak dianggarkan. Menurutnya, bukan pembiayaan itu yang jadi masalah, tapi sumber dan cara mendapatkan uang dari pemangkasan serta pengelembungan anggaran yang tidak dibenarkan. Lebih tegas dia menyatakan, cara-cara itu termasuk illegal dalam pengelolaan keuangan negara.

Kemudian, dia juga menyinggung audit yang dilakukan BPK. Biasanya, audit oleh BPK lebih bersifat umum. Kecuali, audit dengan tujuan tertentu bila menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan. Model kedua ini akan lebih mendalam karena disertai verifikasi pada orang-orang terkait.

Azharuddin M Amin

Kesehariannya sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Selama Syamsuar jabat Bupati, ia diangkat menjadi *advisor* perencanaan serta tenaga ahli pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan penilai independen saban ada kegiatan. Selama mengurus program itu, ia selalu berinteraksi dengan Yan Prana waktu Kepala Bappeda Siak.

Azharuddin tahu kalau kegiatan MTQ, Tour de Siak, pengadaan perpustakaan masuk dalam program anggaran daerah tiap tahunnya. Namun dana itu tidak mampu menutupi semua pengeluaran. Jika terdapat kekurangan bisa dilakukan pencarian sponsor, minta dana pusat dan jumpain pihak terkait. Yan pernah mendirikan forum CSR atau *Corporate Social Responsibility* sehingga bisa menggunakan dana itu.

Selama Yan menjadi Kepala Bappeda, selalu terbaik di Riau dan pernah jadi 4 terbaik nasional. Juga jadi referensi untuk peningkatan ekonomi, pariwisata dan pertanian. Sepanjang persidangan Azhruddin lebih banyak menyampaikan prestasi yang sudah ditorehkan Yan. Ia tidak tahu tentang pemotongan 10 persen, korupsi Alat Tulis Kantor atau ATK juga makan-minum.

Mexasai Indra

Kesehariannya dosen pada Fakultas Hukum Universitas Riau atau Unri dan sekarang menjadi Dekan terpilih disana. Ia menjelaskan perihal kewenangan dan diskresi, atau kebebasan untuk mengambil kebijakan.

Mexasai sebut bahwa kewenangan inspektorat dalam melakukan kerja dibatasi wilayah administrasi tempat pendirian. Jika Inspektorat bekerja melewati batas wilayah maka terjadi kelainan maksud dari sebuah kewenangan dan hasil kerjanya dianggap tidak ada.

Ia katakana, hanya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menetapkan nilai kerugian negara sesuai SEMA 4/2016. Lembaga lain hanya sebatas menghitung dan audit investigasi atas keuangan negara.

Jika seorang ASN memakai uang pribadi untuk melakukan perjalanan dinas, itu sudah dianggap lazim, sebab tidak ada peraturan yang melarang. Dan pimpinan bisa melakukan pemotongan setelah uang itu dikembalikan, lalu uang tersebut dipakai untuk keperluan penting pada tempat bekerja. Pimpinan dapat pengecualian, tindakan itu disebut diskresi bersyarat. Sudah adanya perpindahan uang negara



menjadi milik pribadi setelah utang perjalanan dinas dibayar, maka tidak terdapat kerugian negara. Paling penting, administrasi pencairan dinyatakan lengkap.

Erdiansyah

Kesehariannya sebagai pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Unri. Ia menjelaskan tentang kewenangan perhitungan kerugian negara.

Ia katakan, paska putusan Mahkamah Konstitusi 31 /PUU-X/2012 hanya Komisi Pemberantas Korupsi yang dapat menganulir putusan tersebut. Hanya KPK yang dapat melakukan perhitungan kerugian negara dengan melibatkan BPK, BPKP atau instansi lain dengan fungsi yang sama. Hal ini tidak berlaku untuk kejaksaan sebab kerja jaksa hanya diatur pada UU 16/2004.

Jika jaksa ingin menentukan nilai kerugian negara dengan melibatkan pihak selain BPK, maka hasil itu tidak sah dan dianggap salah. Maka dakwaan yang memuat kerugian negara selain dari BPK haruslah batal.

Terakhir Erdiansyah berpendapat, bahwa dalam hal perjalanan dinas apabila uang pengganti telah dibayarkan pada pihak terkait maka itu tidak menyebabkan kerugian negara. Jika uang tersebut dipotong sebelum diserahkan kepada pihak terkait, maka itu termasuk tindakan yang merugikan keuangan negara.

Jaksa menutup dengan mempertanyakan apabila anggaran pembelian ATK misalnya 10, namun yang dibelanjakan hanya 5. Serta mengisi faktur kosong untuk disesuaikan dengan anggaran, apakah itu merupakan tindakan korupsi? Erdiansyah pun menjawab “Iya”.

Elwi Danil

Dia Guru Besar Pidana Universitas Andalas, Padang. Beri penjelasan tentang keuangan negara, kerugian negara, diskresi dan alur penetapan tersangka pada Tipikor.

Menurut Elwi, keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik uang, barang dan segala bentuk yang menjadi hak negara. Sedangkan kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang atau barang sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum. Jika nilai kerugian negara sudah ditetapkan maka itu masuk dalam perbuatan korupsi.

Untuk menetapkan kerugian negara, hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dapat melakukannya. Lembaga lain hanya sebatas audit keuangan dan audit investigasi. Ini sesuai dengan bunyi putusan MK 31/PUU-X/2012. Poin Kesimpulan butir 8 : *Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum mengenai badan yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara serta menilai dan /atau menetapkan jumlah kerugian negara adalah BPK...* Dalam putusan tersebut tepatnya halaman 53, ... *KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK.* Kewenangan ini tidak berlaku untuk penegak hukum lainnya. Kejaksaan berpatokan pada UU 16/2004.



Penjelasan selanjutnya tentang diskresi. Menurut Elwi Diskresi itu adalah suatu kebijakan yang boleh dilakukan pimpinan ketika ada hal mendesak yang harus segera diselesaikan, dengan catatan tidak bertentangan dengan undang-undang. Apabila pemimpin tadi melakukan pelanggaran, maka hukum administrasi diutamakan, lalu senjata terakhir dilimpahkan pada proses pidana. Karena selama ini penegak hukum tidak lihat keuntungan yang didapat dari melakukan diskresi. Hanya sekedar melihat pelanggaran administrasi langsung dijadikan alasan untuk menjerat dengan pasal Tipikor.

Terakhir, terhadap perkara Tipikor khususnya terdapat kerugian negara, Elwi berpendapat untuk menetapkan tersangka tidak boleh hanya sekedar pakai 2 alat bukti. Harus dahulu ditemukan nilai kerugian negara yang sudah ditetapkan oleh BPK.

Yan Prana

Sejak September 2011 hingga 2017, menjabat Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran. Tugasnya, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan mensahkan setiap laporan pengeluaran dan program pembangunan.

Yan pernah diminta oleh Dona Fitria saat rapat rutin 2014, untuk menyebutkan kepada semua pegawai saat selesai rapat tentang akan dilakukannya pemotongan perjalanan dinas guna menutupi setiap pengeluaran yang tidak punya mata anggaran dan biaya tak terduga. Seperti biaya MTQ, *tour de siak*, acara lomba dan banyak lagi. Yan hanya beri pertolongan kepada Dona untuk sampaikan ke forum rapat. Ide pemotongan murni saran Dona.

Yan tahu pemotongan itu terlaksana setelah dapat laporan dari staffnya yang mengeluh. Ia mengaku sibuk dan pegang banyak jabatan sehingga tidak sempat untuk lakukan monitoring. Lalu, tidak pernah juga terima laporan hasil dari 10 persen itu, apalagi menikmati hasilnya. Setiap kali Yan melakukan perjalanan dinas ia tidak pernah dikenai pemotongan.

Mengenai belanja makan dan minum. Yan bercerita sudah menjadi kebiasaan sebelum ia bekerja disana, makan dan minum dibelikan dalam bentuk benda bukan ditransfer ke tiap rekening pegawai. Anggaran makan siang menghabiskan uang yang banyak, sehingga sejak 2015 ia minta ke Bupati Syamsuar untuk menghapuskan program ini. Dan disetujui. Biayanya dialihkan untuk program pengaspalan jalan desa. Jikalau ada tamu dan rapat rutin biasanya memesan ke kantin belakang Kantor Bappeda milik Yuni, kakak kandung Eka Staff Bappeda. Ini dilakukan sebab jarak kantor dengan rumah makan jauh. Cara ini cukup efektif dan biayanya kecil.

Mengenai *mark up* pembelian ATK, Yan membantahnya. Ia sebut bahwa Alat Tulis Kantor awalnya dikelola oleh Bendahara Dona Fitria sebab ada keluhan dari pegawai tentang seringnya terjadi keterlambatan pengadaan. Dan berinisiatif ganti penanggungjawab pembelian kepada Erita Bagian Umum. “Demi Allah saya tidak pernah menyuruh mereka untuk lebihkan uang ATK sama sekali.” Malahan melakukan pergantian orang sebab ada keluhan dari pegawai. Dan tidak ada pemilik toko ATK yang mengenalnya.

Yan mengaku beberapa kali dapat uang dari Bendahara Dona Fitria dan Ade Kusendang. Lalu seringkali meminta bantuan kepada kedua Bendahara dan Erita agar carikan uang, untuk diberi kepada tamu yang mendatangnya ataupun sekedar meminta tolong. Biasanya biaya tambahan lebaran untuk petugas kebersihan kantor; pegawai honor; supir serta ajudan bupati dan wakilnya,

tambahan biaya sekolah anak, ucapan ulang tahun dan lainnya. Ini sudah biasa dilakukan sebab ia punya relasi yang banyak di tiap dinas sampai ke kampung-kampung di Siak. Ia tidak tahu sumber uang, mereka sudah terbiasa saling minta tolong dan bendahara menyanggupinya.

Yan berkeluh tidak mendapat keadilan dalam kasus ini. Awalnya terkejut setelah diperiksa menjadi saksi lalu beberapa jam kemudian langsung ditetapkan tersangka. Saat ditetapkan tersangka ia tidak didampingi penasihat hukum makanya menolak menandatangani surat dilakukan pemeriksaan tambahan serta penahanan. Juga tidak pernah mendapat Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan.

Sewaktu masih dilakukan pemeriksaan di Kejati Riau, Ade Kusendang datang ke rumah Dinas Yan kala masih jabat Sekda Riau. Mereka berkeluh sebab sudah diperiksa penyidik Kejati. Yan bilang ikuti saja prosedurnya. Ia tidak pernah pengaruhi Ade Kusendang dan Dona Fitria untuk bakar dan sobek catatan pendapatan dan pengeluaran dari pemotongan 10 persen.

lalu membantah dan sebut tidak masuk logika, kala ia sudah pindah menjadi Kepala Badan Keuangan Daerah masih meminta uang Rp35 juta ke Erita dan Ade Kusendang. Dan penyerahan uang didepan parkir kantor. “Tidak masuk akal,” kata Yan.

Sebelum tutup sidang Yan bacakan secarik kertas yang ditulis tangan. “Saya sedih dengan *statement* mantan staff yang bersaksi sepanjang persidangan ini. Itu semua tidak benar. Keterangan itu menjerumuskan. Saya tunggu pertanggung jawabannya di akhirat nanti.” Yan terbata-bata membacanya, istrinya Fariza terisak dikursi pengujung.

Temuan dan Analisis

Selama jadi Kepala Bappeda Siak 2012-2017, Yan Prana Jaya Indra Rasyid korupsi dari pemangkasan perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor dan konsumsi harian pegawai. Dia perintahkan bawahannya mengumpulkan pundi-pundi uang dari tiga kegiatan tersebut untuk kepentingan pribadi. Bahkan setelah berganti jabatan, Yan masih menikmati sisa-sisa uang korupsi itu.

1. Perintah anak buah korupsi (cari duit)

Yan menyuruh dua bendahara pada masanya, Dona Fitria dan Ade Kusendang untuk memangkas biaya perjalanan dinas tiap pegawai di Bappeda Siak sebesar 10 persen. Modusnya, setelah kembali dari tugas di dalam maupun luar daerah, bendahara menyuruh tiap-tiap pegawai menandatangani kwitansi sesuai nominal biaya perjalanan dinas, namun uang yang diserahkan tidak pernah utuh. Dengan kata lain, nominal yang tertera di kwitansi lebih besar dari yang diterima pegawai. Pemangkasan juga dilakukan setelah beberapa hari penggantian biaya perjalanan dinas diserahkan. Artinya, setelah pegawai terima duit, beberapa hari kemudian bendahara meminta kembali 10 persen dari uang tersebut.

Duit korupsi juga bersumber dari belanja alat tulis kantor. Modusnya, Erita belanja sejumlah peralatan yang tidak sesuai dengan daftar penggunaan anggaran. Untuk mengelabui hal itu, Erita meminta bon kosong tiap kali belanja, selain bon asli dari pemilik toko. Bon kosong tersebut diisi nama-nama sejumlah peralatan sesuai daftar anggaran, meski yang dibeli sebenarnya tidak sesuai. Begitu juga dengan berita acara penerimaan barang yang

ditandatangani, tidak sesuai dengan fisik yang sebenarnya. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani pemilik toko juga lebih besar dibanding dengan jumlah yang diterimanya.

Kemudian, korupsi lainnya berasal dari konsumsi harian pegawai. Modusnya, Eka Susanti memesan makanan di warung kakaknya. Sedangkan pembelian makanan ringan seperti roti sudah ditetapkan satu toko. Dari kegiatan ini juga terdapat selisih pembayaran, seperti model pembelian alat tulis kantor tadi. Kwitansi yang ditandatangani oleh penyedia jasa konsumsi lebih besar ketimbang belanja yang sesungguhnya. Manipulasi laporan seperti itu berkat bon kosong yang diberikan oleh pihak ketiga yang ditunjuk Bappeda Siak dalam tiap kegiatan. Bon kosong tersebut diisi sendiri oleh staf atau honorer atas perintah bendahara maupun kasubbag umum.

2. Korupsi untuk kepentingan pribadi

Dona Fitria, Ade Kusendang maupun Erita menyimpan duit dari hasil korupsi pemangkasan perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor maupun konsumsi. Sewaktu-waktu, Yan Prana tinggal menghubungi mereka jika membutuhkan uang tersebut. Dua bendahara dan kasubbag umum tersebut serahkan langsung sebagian uang ke Yan, atau sekali-kali Yan langsung mendatangi mereka ke meja masing-masing. Beberapa kali, mereka juga titip uang ke Eka Susanti bila hari itu berhalangan hadir. Setelah pindah jabatan sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah Siak, Yan masih sempat menerima sisa-sisa uang korupsi yang masih terkumpul di tangan Dona, Ade dan Erita. Terakhir kali, Ade dan Erita serahkan uang Rp 30 juta ke Yan di halaman parkir kantor Yan.

Yan mengatakan, uang tersebut digunakan untuk menutupi keperluan kantor yang tidak dianggarkan dalam APBD, bahkan untuk tunjangan hari raya para honorer Bappeda Siak. Jika hal ini benar, tidaklah semua uang itu digunakan untuk kepentingan kegiatan kedinasan. Selebihnya digunakan oleh Yan untuk keperluan pribadi karena dari cara dan waktunya meminta di luar dari suasana dan kegiatan kedinasan. Lagi pula, cara Yan memperoleh uang dari anak buahnya itu tidak dibenarkan atau menyalahi aturan. Sebab, tidak ada aturan pemangkasan perjalanan dinas. Sedangkan manipulasi laporan kegiatan dan penggelembungan anggaran adalah salah satu modus korupsi.

3. Menghilangkan barang bukti

Beberapa saksi kunci dari kasus korupsi ini adalah Ade dan Dona. Keduanya bendahara pada masa Yan jadi Kepala Bappeda Siak. Mereka mengungkapkan telah menghilangkan barang bukti korupsi dari hasil pemangkasan perjalanan dinas. Dona, misalnya, telah merobek buku catatan kecil berisi jumlah uang perjalanan dinas pegawai yang dipangkas serta duit-duit yang telah diserahkan pada Yan. Dia melakukan itu atas perintah Yan, setelah naik jabatan jadi Kabag Keuangan. Sedangkan Ade, telah membakar buku catatan kecilnya yang juga berisi uang keluar-masuk dari hasil pemangkasan perjalanan dinas. Dia lakukan itu setelah diperiksa penyidik dan konsultasi ke Yan paska pemeriksaan. Yan menekankan padanya supaya tidak ikut diseret dalam masalah ini.

4. Semua pegawai Bappeda Siak keberatan

Para pegawai Bappeda Siak yang diperiksa mengatakan, tidak setuju dengan pemangkasan perjalanan dinas yang berlaku selama Yan jadi Kepala Bappeda Siak. Alasan yang kompak adalah, mereka tidak sudi karena uang pribadi yang mereka pakai untuk menalangi ongkos perjalanan dinas tidak diganti sepenuhnya oleh bendahara. Namun, mereka tidak berani protes langsung ke Yan, kecuali beberapa diantaranya hanya mengutarakan keberatan pada bendahara. Kebanyakan dari mereka tidak berani setelah mengetahui hal tersebut sudah diputuskan oleh Yan. Sebagian dari mereka mengatakan takut dan tidak berdaya karena hanya sebagai bawahan. Ribut-ribut masalah ini juga sampai ke telinga Yan, namun redam kembali setelah dibahas dalam rapat tahunan 2014. Dalam rapat itu juga tak ada protes yang diutarakan meski masalah pemangkasan perjalanan dinas kembali disinggung. Para pegawai hanya diam meski sebenarnya tetap tidak setuju.

Temuan Terkait Majelis dan Penuntut Umum

Ketua majelis kerap membentak bahkan menekan saksi bila yang bersangkutan lupa atas peristiwa yang ditanyakan padanya. Ketua majelis juga terkadang memaksa kehendaknya agar saksi menjawab sesuai yang diinginkan. Ada saksi yang merubah keterangannya gara-gara ditanya berulang kali oleh ketua majelis. Ketua majelis juga mendokan saksi jadi pelupa gara-gara sering bilang tak tahu saat ditanya. Intinya, ketua majelis kerap ngomel dan mengutarakan ucapan bernada negatif dari meja sidang bila tak puas dengan jawaban saksi.

Awal pemeriksaan saksi, penuntut umum cenderung tidak melindungi saksi yang dihadirkan, dengan kata lain membiarkan saksinya dicecar dan ditekan oleh penasihat hukum. Mestinya, penuntut umum menjaga mental dan semangat saksi untuk berkata jujur, bukan malah membiarkannya tertekan dengan kalimar-kalimat penasihat hukum yang menyudutkan bahkan melenceng dari agenda pemeriksaan. Sikap dan penuntut umum baru mulai berubah setelah pemeriksaan saksi lanjutan pada persidangan berikutnya. Selain itu, penuntut umum juga tidak mampu membuktikan penggunaan uang yang mengalir ke Yan Prana.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Yan Prana terbukti melanggar Pasal 12 Huruf f UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

1. Majelis Hakim menghukum Yan Prana Jaya Indra Rasyid selama 10 tahun dan pidana denda Rp 500.000.000
2. Gubernur Syamsuar segera memberhentikan Yan Prana dengan tidak hormat setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap